

ISSN 1693-3826 Volume III No: 6

Desember 2005

EKSPRESI

MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI



Departemen Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa



Memahami Bahasa Politik dan Politik Bahasa

Oleh : Ririk Ratnasari *)

Pendahuluan

Kita barangkali sepakat bahwa bahasa adalah alat ekspresi. Bahasa juga alat komunikasi antarmanusia. Masyarakat ada dan menciptakan bahasa untuk saling berhubungan. Demikian pula, dalam sistem pemerintahan negara. Bagi sebuah negara bahasa mempunyai kedudukan yang penting karena menunjukkan identitas dan kedaulatannya dalam pergaulan internasional, demikian halnya dengan bahasa Indonesia. Atribut kenegaraan itu menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia di tengah perubahan dunia yang tidak jarang berpotensi mengancam keutuhan dan kebersamaan sebuah negara, tak terkecuali Indonesia.

Dalam dunia perpolitikan dan kenegaraan bahasa Indonesia telah diterima sebagai bahasa nasional dan bahasa menjadi urusan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Bab XV, pasal 36, bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Ketentuan ini memberikan dasar yang kokoh dan resmi bagi perpolitikan bahasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut politik bahasa kita menjadi jelas arahnya yaitu bagaimana menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang perlu dijaga

ketertibannya, sebab sebagai alat komunikasi dan penyampai ide bahasa menduduki peran yang penting. Ide yang baik jika disampaikan dengan bahasa yang keliru akan menimbulkan kesalahpahaman dan pertikaian, yang tidak jarang, menimbulkan pertumpahan darah. Dalam menentukan arah perpolitikan bahasa harus disadari bahwa bangsa Indonesia juga mempunyai bahasa daerah yang harus dipikirkan kelangsungan hidupnya, demikian juga dengan kehadiran bahasa asing.

Di sisi lain, tidak bisa diingkari bahwa persoalan bahasa menempati posisi penting dalam wacana politik. Dalam konteks pemerintahan bahasa pun menempati posisi penting untuk menyampaikan rencana dan program kerja, peraturan, kebijakan atau ideologi pemerintah kepada masyarakat. Oleh sebab itu, para pejabat seharusnya memahami persoalan kebahasaan ini, tidak justru tampil dengan “merusak” bahasa. Dalam bertutur sesungguhnya apa yang dipentingkan? Tentulah pemahaman bahasa. Ketertiban dalam berbahasa, bukankah mencerminkan ketertiban dalam berpikir, bersikap dan bertindak?

Tulisan ini akan menelaah hubungan bahasa politik dan politik bahasa. Argumen utama bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat dalam berkomunikasi politik tetapi bahasa juga mempunyai entitasnya sendiri. Entitas

bahasa tersebut tidak dapat "dijungkirbalikkan" demi kepentingan kekuasaan, apalagi bahasa Indonesia telah dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Ini berarti bahasa Indonesia juga memiliki hak-hak politik yang sama dengan bidang lain dalam sistem pemerintahan ini. Garda politik bahasa yang dimotori oleh Pusat Bahasa harus dapat mengembalikan bahasa pada kepentingannya dan dapat menjaga kelanggengan bahasa nasional yang dijunjung sebagai bahasa persatuan.

Bagaimana bentuk penyimpangan linguistik pada bahasa politik?

Antonio Gramsci, seorang pemikir Italia, pernah mengatakan bahwa *bahasa pada dasarnya adalah sebuah fakta politik dan sekaligus instrumen politik. Bahasa merupakan ekspresi kepentingan konkret dari kelompok sosial yang menghasilkan bahasa itu. Dengan sendirinya, kebenaran bahasa sangat bergantung pada praksis politik suatu kelompok yang dominan.*

Indonesia secara politis telah hidup dalam tiga era politik, yaitu orde lama, orde baru, dan reformasi. Pada ketiga era kepemimpinan tersebut tiap-tiap penguasa memiliki ciri khas dalam menyampaikan kebijakan, yang notabene, menggunakan bahasa. Hal itu dapat dilihat dari kosakata yang dipai tiap era kepemimpinan politik berbeda. Orde lama lebih banyak menggunakan kosakata bertema revolusi, orde baru lebih sering menggunakan kosakata bertema pembangunan, sedangkan generasi reformis lebih senang menggunakan kosakata sosial. Akan tetapi, meskipun bahasa yang digunakan

berbeda pada intinya mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu mempengaruhi, menekan dan bahkan mungkin membohongi masyarakat dengan bahasa yang halus demi kepentingan kekuasaan semata. Tengok saja bahasa-bahasa yang digunakan para politikus, yang dipopulerkan oleh jurnalis, seperti kata 'korupsi' sebagai bentuk halus komersialisasi jabatan. 'kericuhan' sebagai bentuk halus kerusuhan, 'penyesuaian harga' bentuk halus dari kenaikan harga, dsb.

Bahasa, sebagaimana dikatakan para ahli, merupakan sistem tanda, yang telah disepakati bersama diantara penutur bahasa. Akan tetapi, ketika bahasa digunakan sebagai alat defensif pelanggaran kekuasaan, khususnya dengan cara manipulasi tanda, dapat menimbulkan berbagai 'distorsi makna'. Bahasa yang mengalami distorsi inilah yang kemudian oleh Pierre Bourdieu dapat menjadi sebuah alat 'kekerasan simbol' (*symbolic violence*), yaitu sebuah 'bentuk kekerasan berupa pemaksaan simbolik yang halus dan tak tampak, sehingga orang yang dipaksa tidak menyadari adanya pemaksaan, atau menerima pemaksaan tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

Pemunculan bahasa-bahasa dalam sistem pemerintahan pada hakikatnya merupakan eksploitasi bahasa Indonesia demi tujuan politik dan kekuasaan. Menurut Prof. Benedict Anderson, bahasa politik hampir tidak bisa diterjemahkan lurus ke dalam bahasa Indonesia. Selain sebagai suatu kekacauan irrasional yang hampir tidak terselamatkan. (Pikiran Rakyat, Selasa 5 Oktober 2004) Perwujudan hegemoni pemakaian bahasa

Indonesia tersebut tampak dominan sekali dalam fakta akronimisasi dan pemakaian bentuk eufimisme. Pemakaian bentuk linguistik tersebut dalam istilah politik sepertinya sudah terlalu jauh sehingga melampaui hakikat akronim dan eufimisme itu sendiri dalam pengertian linguistik.

Bentuk-bentuk distorsi makna yang sering muncul dalam bahasa politik antara lain:

1. Eufimisme

Usaha penghalusan makna secara linguistik dikenal dengan istilah eufimisme, yaitu suatu upaya untuk melakukan pelembutan atau penghalusan dalam penyebutan yang pada awalnya digunakan untuk mencapai kesantunan bahasa melalui konsensus baru sehingga yang muncul ke permukaan adalah wacana yang halus untuk didengar. Gejala pemakaian eufimisme ini tampak dominan dalam bahasa politik. Akan tetapi, pemakaiannya telah jauh menyimpang dari pengertian eufimisme secara linguistik. Eufimisme dalam bahasa politik digunakan untuk menutupi realitas politik itu sendiri.

Pemakaian eufimisme bertujuan untuk menutupi maksud yang sesungguhnya terjadi, seperti terlihat pada kalimat:

- (1) Mantan menteri agama, Said Agil Al Munawar, dan mantan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggara Haji, Departemen Agama, Taufik Kamil *diserahkan* kepada Kejaksaan Agung (Kompas, Senin 12 September 2005).

Kata *diserahkan* pada kalimat tersebut untuk menutupi realitas bahwa yang

bersangkutan, pejabat negara, sedang diperiksa atau diinterogasi oleh Kejaksaan Agung.

- (2) Pemerintah minta direksi Pertamina untuk mengklarifikasi perihal dugaan *pengelembungan harga* dalam pengadaan solar impor (Republika, Sabtu 17 September 2005).

Kata *pengelembungan harga* pada kalimat tersebut sesungguhnya bermakna adanya kenaikan harga dari harga yang sebenarnya. Kata *pengelembungan* berkonotasi negatif dengan adanya rekayasa bahwa dalam kenaikan harga tersebut disebabkan oleh adanya 'permainan' di jajaran Pertamina. Melalui eufimisme para petinggi pemerintahan bukan hanya menyembunyikan atau menciptakan realitas, tetapi juga bersembunyi dari realitas yang sesungguhnya terjadi. Hal itu, tampak pada contoh berikut:

- (3) AAI akan membuka posko-posko bantuan hukum bebas biaya, khusus masyarakat tidak mampu dengan perkara ancaman minimal lima tahun (Kompas, Senin 12 September 2005). Frasa masyarakat tidak mampu pada kalimat tersebut tidak jelas rujukannya, siapa yang disebut rakyat tidak mampu. Melalui frasa inilah tampaknya pemerintah ingin bersembunyi dari realitas bangsa dan masyarakatnya.

Sementara itu, eufimisme yang digunakan untuk menyembunyikan realitas tampak pada kalimat :

- (4) Saat itu dibicarakan soal *dana untuk kesejahteraan* KPU dan alternatifnya (Republika, Sabtu 17 September 2005)
- (5) Pimpinan dan semua anggota KPU menerima *dana rekanan*. (Kompas, Senin 12 September 2005).

Kata *dana untuk kesejahteraan* dan *dana rekanan* pada kalimat tersebut untuk menyembunyikan realitas pemberian gaji tambahan pada anggota KPU dan suap untuk KPU. Realitas yang menyakitkan rakyat ini tampak dikemas dengan baik melalui eufimisme oleh pejabat yang diamini oleh pers.

Selanjutnya, jika ambiguitas bahasa politik ini terjadi terus menerus dan bertemu dengan bahasa resmi akan menimbulkan kecurigaan pada masyarakat. Hal yang lebih parah ditimbulkan dari virus tersebut akan menyulut adanya rumor, desas-desus, gosip, ataupun pelesetan, seperti yang tampak pada kalimat berikut:

- (6) Perubahan tersebut juga mempertegas *pembagian* kekuasaan antarlembaga negara dengan sistem saling *mengawasi* dan saling mengimbangi (Buku Panduan Pemasarakatan UUD1945)
- Kata *pembagian* dan *mengawasi* pada kalimat (6) dapat dipelesetkan bahwa pembagian terjadi tidak hanya pada kekuasaan tetapi pada hal-hal yang lainnya juga, termasuk dana. Sementara itu, kata *mengawasi* dapat disalahtafsirkan bahwa dalam sistem pemerintahan tugas antarlembaga saling mengawasi sehingga ketika ada penyelewengan atau penyimpangan mereka diam sebab tugas mereka

hanya mengawasi dan bukan melaporkan apalagi menindak.

Itulah sebagian akibat yang dapat ditimbulkan apabila penyimpangan bahasa yang dipakai dalam bahasa politik bertemu secara intens dengan bahasa resmi. Masyarakat akan merespon dengan menggunakan bahasa mereka yang biasa disebut dengan pelesetan.

Plesetan hakikatnya merupakan bahasa simbol yang digunakan untuk melawan para elite politik. Hal itu dilakukan karena rakyat kecil tidak menikmati perubahan dari satu orde ke orde lain, mereka masih miskin dan marginal siapa pun yang menjadi presidennya. Mereka juga tidak percaya bahasa yang digunakan para pejabat, akibatnya masyarakat mulai membuat perlawanan yang simbolis melalui plesetan. Plesetan mungkin tidak menyebabkan pemerintah turun, tetapi ini masih cara yang penting untuk perlawanan.

2. Kiasan

Bahasa kiasan ialah bahasa yang digunakan untuk menyatakan sesuatu hal dengan mengiaskannya kepada hal lain, sama ada dengan menyebut bandingan atau tanpa menyebut bandingan. Pada era reformasi ini penggunaan bahasa kias masih sering ditemui, seperti yang terdapat dalam kalimat berikut:

- (1) Harus dijaga agar dana ini tidak *menguap* dan dinikmati *tikus* yang tidak berhak (Suara Karya, Senin 19 September 2005).

Kata *menguap* dan *tikus* pada kalimat tersebut jelas mengandung kiasan karena yang dimaksudkan *menguap* dan *tikus* dalam kalimat tersebut artinya berbeda secara harfiah. Menguap dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai menjadi uap, sedangkan tikus adalah binatang pengerat yang merupakan hama yang mendatangkan kerugian.

Dalam data kalimat (1) *menguap* dikiasan dengan hilang, sedangkan *tikus* orang yang mengambil hak orang lain. Contoh ditemukan dalam harian Kompas, 12 September 2005:

- (2) Asosiasi Advokat Indonesia mencoba mengukuhkan komitmennya memerangi godaan *suap*. (Kompas, Senin 12 September 2005).

Suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai nasi sebanyak yang dijumput dengan jari dan dimasukkan ke dalam mulut ketika makan. Namun, dalam konteks kalimat (2) suap mengiaskan uang sogokan.

Penggunaan kiasan dalam komunikasi politik tersebut dapat menimbulkan salah tafsir karena begitu banyak makna kata-kata untuk menyampaikan satu informasi sehingga memunculkan informasi yang bias. Akibatnya publik memahami pernyataan tersebut dengan pemahaman yang berbeda, seperti pada kalimat:

- (3) Pembangunan yang bersifat *mercusuar* tanpa pemerataan disebut-sebut sebagai biang keladi kesenjangan yang

tampak mengganggu (Republika, Sabtu 17 September 2005).

Mercusuar sesungguhnya mempunyai makna menara yang dibangun dipantai untuk memancarkan sinar isyarat pada waktu malam hari untuk membantu navigasi. Selain itu, mercusuar berkonotasi dengan sesuatu yang dipakai untuk memperoleh nama dan untuk gagah-gagahan. Dalam konteks kalimat tersebut bisa saja terjadi salah tafsir bahwa sedang ada pembangunan mercusuar.

3. Istilah asing

Penggunaan kata-kata asing dalam suatu pernyataan biasanya dikarenakan belum adanya padanan kata tersebut dalam bahasa Indonesia seperti contoh berikut;

Dengan begitu *near poor* itu tidak lebih dari istilah karena pada kenyataannya mereka ini termasuk miskin (Suara Karya, Senin 19 September 2005).

Pada kalimat tersebut terdapat istilah asing *near poor*. Istilah tersebut merupakan istilah baru yang memang belum terdengar. Apabila diterjemahkan secara lugas, istilah tersebut menjadi *mendekati miskin*. Istilah itu digunakan untuk mengklasifikasikan golongan penduduk miskin, yang akan dikenai imbas kenaikan harga BBM. Namun, istilah itu pun tampaknya belum tepat, sebab tidak ada kriteria yang jelas yang membedakan antara masyarakat yang mendekati miskin dengan masyarakat miskin.

Petinggi pemerintahan kadang-kadang menggunakan kata-kata asing sebagai penjaga gengsi, “prestise” jabatannya, atau agar menimbulkan kesan intelek. Akibatnya, terkadang kata yang dipilih tidak tepat dan tidak mewakili konsep yang ingin disampaikan. Akibat kronisnya masyarakat tidak paham dengan maksud yang sesungguhnya sehingga bukanlah hal yang mustahil jika akhirnya timbul kesalahpahaman.

4. Singkatan dan akronim

Politisi di Indonesia seringkali memunculkan akronim dan singkatan. Tujuan pembuatan akronim dan singkatan pada hakikatnya sama yaitu untuk mempermudah mengingat frasa atau kalimat. Pada bahasa politik penggunaan singkatan dan akronim untuk memudahkan membentuk istilah-istilah politik, dan bagi para politisi penggunaan singkat dan akronim lebih sederhana daripada mengucapkan sederetan kalimat. Sebagai contoh pada data yang ditemukan:

- (1) Langkah- langkah intensif dan cepat yang saat ini dilakukan oleh *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* dan *Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tastipokor)* menyimpang dari tujuannya (Kompas, Kamis 23 Juni 2005).
Penyingkatan frasa *Komisi Pemberantasan Korupsi* dengan (*KPK*) dan pengakroniman *Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* dengan (*Tastipokor*) lebih singkat dan mudah diingat.

Sisi negatif penggunaan akronim, apabila akronim yang dibuat sangat panjang akan kehilangan esensinya, sebab masyarakat akan mengenali akronim tersebut sebuah kata, dan ironisnya lagi kata tersebut seolah tak bermakna. Pada tiap orde penguasaan singkatan dan akronim yang diciptakan berbeda. Pada orde lama singkatan dan akronim tajam dengan bau revolusi seperti, gestapu, naskom, dll. Pada masa orde baru elite politik menciptakan singkatan dan akronim yang sarat dengan militerisme seperti, Ipoleksosbud, hankam, hansip, waskat, dll.

Sementara itu, petinggi pemerintahan di era reformasi juga menciptakan akronim dan singkatan. Yang membedakannya dengan masa pemerintahan sebelumnya akronim dan singkatan yang dibuat saat ini dekat dengan keadaan sosial., seperti pada data yang ditemukan:

- (2) Masih ada warga yang sult mendapatkan kartu *keluarga miskin (gakin)* (Republika, Sabtu 17 September 2005);
- (3) Menurut Ibrahim, Sri yang tinggal sebatang kara di Jakarta memang warga yang layak mendapatkan kartu *JPS (Jaring Pengaman Sosial)*. (Republika, Sabtu 17 September 2005);
- (4) Presiden mengemukakan pangkal utama dari masalah kelangkaan *bahan bakar minyak (BBM)* di Indonesia karena kenaikan harga minyak dunia (Kompas, Kamis 23 Juni 2005).

Perubahan arah pembentukan akronim dan singkatan ini sejalan dengan pendapat

Jalaluddin Rakhmat, dalam buku *Bahasa dan Kekuasaan* yang menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada akronimi dan penyingkatan, tetapi pada kosakata yang diciptakan tiap rezim penguasa. Lebih lanjut dikatakannya bahwa perubahan kosakata tersebut mengindikasikan pada tiga hal: ideologi elite penguasa, distribusi kekuasaan, dan jenis elite penguasa. (1996: 51)

Bagaimana usaha politisi bahasa?

Politik bahasa merupakan suatu usaha untuk mempertahankan kehidupan bahasa dalam masyarakat suatu negara. Politisi bahasa telah merumuskan politik bahasa nasional. Politik bahasa nasional adalah kebijakan nasional yang berisi pengarahannya, perencanaan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia.

Pengaturan masalah kebahasaan perlu didasarkan pada kehendak politik yang mantap. Butir ketiga sumpah pemuda 1928 menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang harus dijunjung dan dihormati oleh seluruh warga negara, termasuk para petinggi pemerintah, dan politikus. Pernyataan tersebut telah jelas merupakan pernyataan politik yang sangat mendasar dan strategis dalam bidang kebahasaan. Menurut Alwi (2000:7-8) kebijakan nasional dirumuskan sebagai politik bahasa nasional yang berisi perencanaan, pengarahannya, dan ketentuan-ketentuan yang

dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan.

Berbicara mengenai masalah kebahasaan di Indonesia berarti menyangkut tiga aspek, yaitu bahasa, pemakai, dan pemakaian. Aspek bahasa berkaitan dengan banyaknya bahasa yang ada di Indonesia, seperti; Jawa, Sunda, Batak, dan bahasa asing. Aspek pemakai berkaitan dengan penutur bahasa tersebut yang di dalamnya secara inklusif termasuk keterampilan dan sikap pemakai bahasa. Adapun pemakaian bahasa mengacu pada bidang kehidupan yang menjadi ranah pemakaian bahasa. Ketiga aspek inilah yang nantinya akan menjadi tolok ukur keberhasilan politisi bahasa dalam mempertahankan bahasa nasional.

Apabila bahasa politik dianalisis lebih jauh aspek kebahasaan ini akan diketahui bahwa, bahasa politik di Indonesia secara resmi menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai sebuah ilmu sudah memiliki aturan secara linguistik yang tidak boleh diselewengkan karena kalau hal itu dilakukan dapat merusak kaidah kebahasaan yang telah ditentukan. Dari segi pemakai, jelas pemakai bahasa politik adalah elite politik. Artinya, para petinggi negara pun harus mempunyai keterampilan dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia sehingga ketika menyampaikannya dengan kaidah kebahasaan yang benar, tanpa harus kehilangan esensinya.

Sementara itu, ranah pemakaian bahasa politik jelas pada bidang pemerintahan dan ketatanegaraan. Sesungguhnya

pemakaian bahasa pada bidang politik tidak berbeda dengan pemakaian bahasa secara umum. Ironisnya, pemakai bahasa pada pemakaian bidang politik dan pemerintahan lebih senang mengubah kaidah-kaidah linguistik yang telah ditetapkan. Hal itu barangkali disebabkan, pemakainya belum memiliki keterampilan yang memadai atau pun belum memiliki sikap positif pada bahasa nasional. Bahkan dugaan yang lebih parah yang dapat muncul adalah *toh*, kalau melanggar kaidah kebahasaan tidak dikenai denda atau sanksi, seperti halnya kalau melanggar peraturan-peraturan negara yang lainnya. Oleh karena itu, politik bahasa di Indonesia harus dapat memenuhi peran dan fungsinya sebagai sarana komunikasi dalam upaya pencerdasan warga negara. Politik bahasa di Indonesia harus jelas menggambarkan kebijakan nasional dalam bidang kebahasaan. Pada era orde baru bahasa Indonesia, sebagai bahasa persatuan, telah dinodai dengan berbagai bentuk distorsi bahasa, sampai-sampai muncul istilah bahasa pejabat. Akankah pada era reformasi ini distorsi itu akan dilanggengkan?

Simpulan

Bahasa dan politik seolah-olah berada dalam satu pertarungan besar. Keduanya hadir bersama-sama tetapi membawa entitas yang berbeda. Oleh karena itu, terlalu riskan bila dipertanyakan apa atau siapa yang mempengaruhi bahasa. Medan pertarungan bahasa politik adalah bahasa dan simbol yang pada kenyataannya tidak hanya digunakan sebagai sebuah alat komunikasi, akan tetapi juga sebagai alat kekuasaan. Artinya, orang

(yang berkuasa) tidak hanya ingin didengar dan dimengerti, tetapi juga ingin dipercayai, dihargai, dipatuhi, dan diikuti oleh orang-orang yang dikuasainya. Untuk itu, diperlukan kecerdasan simbolik.

Bahasa yang digunakan dalam bidang politik diciptakan untuk menimbulkan kesan dapat dipercaya dan dapat mempengaruhi masyarakat. Kesan yang baik sangat penting untuk karier politisi, menggunakan bahasa yang salah atau menghina bisa menyebabkan orang lain tidak percaya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan karir politiknya. Akibat usaha politisi, mereka, baik secara sadar ataupun tidak telah mengeksploitasi bahasa sehingga menciptakan distorsi. Bahasa yang terdistorsi itulah yang seharusnya dikembalikan pada hakikat bahasa yang sesungguhnya. Namun sayang, tampaknya distorsi bahasa yang terjadi terlalu parah sehingga sulit dikembalikan pada kaidah keilmuan yang semestinya, sekalipun oleh para politisi bahasa. Barangkali tidaklah berlebihan kalau suatu saat juga dibuat undang-undang bahasa agar para pengguna bahasa, merasa berkewajiban menjaga keutuhan bahasa Indonesia sehingga tidak ada 'penyelewengan' dalam penggunaan bahasa Indonesia.

Bersambung ke halaman 46

mengenai siapa (nama lengkap) presiden China, siapa (nama) pemimpin Palestina, siapa (nama) Sekretaris Jenderal PBB, dan siapa nama lengkap Condi.

Penutup

Dalam sebuah percakapan konvensional, para pelibat dalam percakapan senantiasa tertakluk kepada maksim percakapan (*conversational maxims*). Akan tetapi dalam percakapan nonkonvensional tidaklah berlaku demikian. Maksim percakapan itu dapat saja ditawarkan, dalam arti bahwa maksim-maksim itu dalam implementasinya dapat saja dilanggar selama pelibat di dalam percakapan itu memiliki argumentasi pragmatis untuk melanggarnya.

Pustaka Acuan

- Allan, Keith. 1986. *Linguistic Meaning. Volume One*. New York: Routledge and Kegan Paul.
- Chaer, Abdul. 1990. *Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Grice, H.P. 1975. Logic and Conversation. Dalam Peter Cole dan Jerry Morgan (eds.). *Syntax and Semantics 3: Speech Acts*. 41-58. New York: Academic Press.
- Hornby, A.S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. 1986. Oxford: OUP.
- Subroto, D.Edi. 1993. *Semantik Leksikal II*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Thomas, Jenny. 1995. *Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics*. New York: Longman.

Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi.

_____. 1999. *Semantik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

_____. 2002. Wacana dan Pragmatik. Dalam Kris Budiman (ed.). *Analisis Wacana: Dari Linguistik Sampai Dekonstruksi*. 55-82. Yogyakarta: Kanak.

Zgusta, Ladislav. 1971. *Manual of Lexicography*. Paris: Mouton the Hague.

*) Penulis adalah Staf PPPG Bahasa



Sambungan dari halaman 41 Daftar Pustaka

Bourdieu's critical conflict theory. http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu

Hasan Alwi dan Dendy Sugono (editor) 2000. *Politik Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa

"Language," Languages and Common Sense. http://www.marxists.org/archive/gramsci/editions/spn/study_philosophy/ch01.htm#s09

Pikiran Rakyat, Selasa 5 Oktober 2004

Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (editor). 1996. *Bahasa dan Kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan